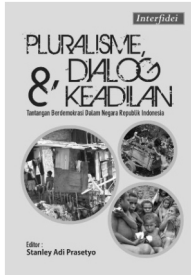


TINJAUAN



Langkah Gontai Menuju Pluralisme

Teuku Kemal Fasya



Judul : Pluralisme, Dialog, dan Keadilan: Tantangan Berdemokrasi dalam Negara Republik Indonesia.
Penulis : Stanley Adi Prasetyo (ed).
Penerbit : Dian-Interfidei, Yogyakarta.
Cetakan I : Oktober 2011.
Tebal : 232 + viii hal.
ISBN : 979-8726-08-1.



Judul : Kontroversi Gereja di Jakarta.
Penulis : Tim Peneliti Yayasan Paramadina, dll
Penerbit : Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Yogyakarta.
Cetakan I : Maret 2011.
Tebal : 157 hal.
ISBN : 978-602-96257-3-8.

Kendati Indonesia dianggap sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan menempati posisi ketiga paling demokratis di seluruh dunia, kualitas riil dari demokrasi negeri ini masih harus dilihat secara objektif menurut 'kacamata orang dalam'. Secara makro Indonesia memang dianggap sebuah negara yang mulus melakukan transformasi politik, dari otoritarianisme ke era reformasi dengan tidak berdarah-darah(?). Termasuk adanya konsolidasi dari kalangan penduduk muslim sebagai mayoritas untuk tidak mengubah negara ini menjadi negara agama/sektarian. Label itu kemudian semakin dipertahankan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menggelar Bali Demokrasi Forum (BDF), yang diselenggarakan setiap tahun dan mengundang partisipan negara-negara demokratis. Perhelatan itu telah berlangsung sejak 2008 dan dilaksanakan setiap awal Desember. Namun bagaimanakah sesungguhnya dasar laut demokrasi kita?

Dalam catatan *Foreign Policy* yang dirilis awal 2011, Indonesia

termasuk urutan ke-61 negara yang paling tidak stabil. Memang urutan ini masih lebih baik dibandingkan Somalia, Sudan, Zimbabwe, Chad, dan Irak yang menempati negara paling gagal di dunia. Namun hal itu semakin memberikan pertanyaan besar tentang kualitas demokrasi di Indonesia yang belum mampu menjawab masalah kesejahteraan, kenyamanan, dan kualitas kebebasan sipil dan beragama.

Kasus Cikeusik, Temanggung, GKI Taman Yasmin, dan HKBP—untuk menyebut beberapa kasus yang merebak di sepanjang tahun 2011—menunjukkan ada masalah akut terkait relasi umat beragama di Indonesia, yang kualitasnya tidak semakin membaik di era reformasi ini. Mengerasnya konflik antar-umat beragama dan internal agama, atau antara kelompok mayoritas dan minoritas ini menunjukkan posisi agama masih sebagai sumber pertikaian, yang ujungnya adalah humiliasi, dehumanisasi dan degradasi agama sebagai sumber perdamaian dan kebaikan.

Kasus GKI Taman Yasmin misalnya, yang telah menarik perhatian dunia dan media massa, baik dalam dan luar negeri, telah mengindikasikan pelanggaran HAM serius. Ironi ini memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas agama yang diakui negara harus tersingkir dan menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Hukum (Putusan Kasasi Mahkamah Agung) harus kalah oleh perilaku arogan aparat negara dalam hal ini Walikota Bogor, dan premanisme warga dengan klaim mayoritas. Eksistensi negara romping di tangan aparat negara, karena hukum tidak manjur mendistribusikan keadilan bagi semua. Prinsip HAM, *majority rule*, *minority rights* tidak mempraksis. Hukum dan ketentuan perundangan-undangan memang selalu berhasil dibuat oleh kelompok mayoritas, sebagai konsekuensi demokrasi prosedural, namun hukum harus sensitif mengakomodasi hak-hak minoritas dan tidak menyepelkan eksistensi mereka.

Dua buku yang dibahas dalam tulisan ini, *Pluralisme, Dialog, dan Keadilan: Tantangan Berdemokrasi dalam Negara Republik Indonesia* dan *Kontroversi Gereja di Jakarta* menjadi nila dalam susu belanga negara ini yang berhasil meraih gelar *champion of democracy* di Warsawa, Polandia,

tahun lalu. Kedua buku ini menunjukkan dengan jelas desau dan galau praktik keberagamaan Indonesia yang masih jauh dari ideal. Mengapa hal ini terjadi?

Pertama agama telah jatuh dalam helai-helai ayat denotatif yang hanya meruyak perbedaan-perbedaan sosiologis umat. Kitab suci diposisikan sebagai kumpulan leksikal yang mempermanenkan 'perbedaan menjadi permusuhan' tanpa mau peduli dengan realitas keumatan yang semakin kompleks. Agama gagal menggali lebih dalam aspek esetorik yang dimilikinya dan menjadikannya "puisi" yang bisa meruntuhkan perbedaan instrumental di antara agama-agama. Normativitas itu telah membunuh renyut sejarah agama yang memiliki tujuan utama pada pencerdasan, kedamaian, perbaikan moralitas, dan kasih-sayang, di samping fungsi teologis dan transedentalnya.

Kedua, dalam konteks keindonesiaan, negara tidak hadir – seperti diungkap dalam tulisan Stanley Adi Prasetyo – dengan perangkat legal yang dimilikinya untuk menjunjung tinggi HAM yang telah diakui negara ini sebagai salah satu fondasi kenegaraannya. Akibat sikap absen negara itu, pada tahun 2010 saja ada 216 pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi dan menyebar di 20 provinsi. Dengan pekatnya pemberitaan pelanggaran kebebasan beragama tahun ini, bisa jadi angkanya jauh melesat.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan menjadi salah satu produk undang-undang yang menjadi prioritas di masa awal reformasi, menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Bahkan pada tahun 2005, efek dari lahirnya kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemerintah diwajibkan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Kedua kovenan itu telah menjadi UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Ekosob dan UU No. 12 tahun 2005 tentang

Pengesahan Kovenan Sipol, sejak 28 Oktober 2008.

Ketiga, negara ini belum masuk dalam penghayatan esensialnya dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber moral utama berbangsa dan bernegara. Seperti disebutkan Zuly Qodir, tokoh muda Muhammadiyah, ideologi negara itu memang tidak sempurna dalam praktiknya selama ini, terlebih ketika rejim di orde lalu menjadikannya sebagai alat politik kekuasaan. Namun sesungguhnya nilai-nilai Pancasila telah memastikan bahwa hanya dengan pluralisme, humanisme, demokrasi, dan keadilan sosial lah negara ini tetap tegak sebagai sebuah kesatuan.

Para *founding fathers* ketika merumuskan fondasi dasar negara telah memiliki permafhuman bahwa dasar "negara sekuler" adalah pilihan terbaik bagi Indonesia untuk meredam gonjangan sosio-kultural-politik akibat kemajemukan yang dimilikinya. Dengan 250 etnis dan ratusan keyakinan yang ada, baik migran atau pun lokal, Indonesia adalah pualam kebinekaan yang harus dijaga dengan konsep yang bisa menghargai kebinekaan itu tetap utuh dan sehat. Dan itu hanya dengan Pancasila.

Keempat, meskipun masih compang-camping di dalam, ada pesan yang bisa dibagikan negara ini kepada dunia luar. Saat ini, dalam tulisan Greg Barton, profesor bidang keislaman dan demokrasi dari Monash University, Indonesia menjadi kiblat penting, terutama bagi negara-negara Timur-tengah, pasca "Arab Spring" yang bergulir sejak akhir tahun lalu di Tunisia, dan kemudian merebak ke Mesir, Yaman, Oman, Suriah, Libanon, dan Libya. Meskipun ada praktik kekerasan atas dasar agama dan munculnya partai-partai yang berafiliasi agama di awal reformasi, namun Indonesia tetap bisa mempertahankan diri sebagai negara demokrasi sekuler dari dunia Islam.

Dikatakan Barton, meskipun ada aliran keras dalam komunitas Islam di Indonesia yang memenuhi pemberitaan melalui aksinya, termasuk (impor) terorisme, namun kebanyakan intelektual muslim Indonesia tidak pernah goyah pada prinsip melanjutkan ide negara sekuler. Pilihan Islam militan tidak diikuti oleh mayoritas rakyat. Indikatornya adalah semakin mengecilnya partai-partai agama, dan mulai berpalingnya mereka kepada ide-ide inklusif dan pluralisme, termasuk dari

partai-partai Islam puritan seperti PKS, PPP, dan PBB.

Buku ini juga memperlihatkan ada hal-hal yang mungkin "dilihat namun tidak pernah diperhatikan", seperti efek negatif politik Syariat Islam di Aceh atau adanya komunitas Yahudi di daerah Serambi Mekkah itu, seperti yang diulas oleh Teuku Cut Mahmud Aziz. Realitas itu sering tertutupi debu mayoritas dan kesadaran agama yang *taken for granted*. Hal ini karena agama diyakini telah final dalam segala hal, tanpa pernah mendedah dan mengambil jarak, sehingga tidak sensitif dengan transkrip-transkrip tersembunyi (*hidden transcripts*) – memakai istilah James C. Scott – yang ada dalam realitas sosio-antropologis kita.

Di antara transkrip tersembunyi itu adalah masalah pendirian gereja di Jakarta, yang merupakan hasil riset dalam buku kedua. Polemik pendirian gereja menjadi sampel untuk melihat masalah dari kelompok minoritas, yaitu antara umat Islam sebagai mayoritas dan Kristen-Katolik sebagai minoritas.

Ada dinamika yang unik dalam hubungan keduanya dalam rentang sejarah Indonesia. Ada proses yang terputus-putus dalam relasi yang bersifat kooperatif, namun ada juga lonjakan kompetisi dan konflik di tengah-tengahnya. Memang kehadiran agama ini di Nusantara bersamaan dengan sejarah kolonialisme, sejak masa Portugis (1522-1590-an)–yang menyebarkan Katolik hingga Belanda yang mengembangkan Kristen Protestan–termasuk ketika mereka membentuk VOC (1602 – 1799). Atau terkait dengan perjumpaan budaya Barat di Nusantara. Itulah salah satu yang menjadi stigma yang sulit dihilangkan dalam relasi dengan mayoritas.

Sejarah ini kemudian mengidentikkan agama Kristiani sebagai agama penjajah, meskipun dalam dokumentasi sejarah disebutkan gereja termasuk cepat mengambil jarak dengan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan 1945, dengan maksud agar para misionaris tidak diperlakukan sama dengan Belanda. Bahkan perkembangan agama Kristen berkembang cepat setelah 1949, yang menunjukkan bahwa ada proses pembaruan sosial-budaya atau inkulturasi yang berhasil dilakukan dengan penduduk tempatan.

Namun ada memori permusuhan yang menyalak, terutama ketika pendirian gereja terjadi. Ini tak lain karena masih ada trauma isu kristenisasi, yang muncul secara periodik dalam rentang sejarah Indonesia merdeka, termasuk menjelang akhir kekuasaan Orde Lama yang disebarkan oleh para tokoh Muhammadiyah seperti Bisron A. Wardy, Djarnawi Hadikusumo, dan Hasbullah Bakri. Bahkan ada gelombang kristenisasi yang cukup besar yang terjadi pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, di tengah prahara kemanusiaan, pembantaian massa pengikut PKI. Hal itu terjadi karena ada kekuatiran jika tidak memilih agama resmi mereka akan dituduh ateis atau komunis.

Sensus penduduk 1971 menunjukkan bahwa penduduk beragama Kristen di Indonesia menjadi 7,5 persen atau hampir 9 juta jiwa, meningkat jauh dari sensus 1933, yang hanya 2,8 persen atau kurang dari 2 juta jiwa. Data ini mengejutkan di kalangan umat Islam tapi tidak secara kritis dilihat sebagai akibat trauma pembantaian PKI yang secara eksekutif “dilakukan” oleh ormas Islam sehingga terjadinya migrasi kelompok “abangan” kepada agama Kristiani.

Memasuki dekade kedua pada milenium ketiga ini, umat Kristen di Jakarta masih meghadapai kendala pendirian rumah ibadah. Salah satu curah masalah ternyata berasal dari regulasi SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Regulasi ini dianggap menindas bagi kelompok minoritas dan memberikan ruangarogansi bagi mayoritas.

Meskipun demikian dari hasil penelitian buku ini tersimpulkan, tidak dalam semua hal mayoritas menjadi tersalah, karena ada juga izin pendirian gereja yang sejak awal sudah bermasalah. Termasuk tidak semua masalah akan terhunjam konflik, tergantung sikap pejabat pemerintahnya. Jika sebuah daerah memiliki aparat yang mampu

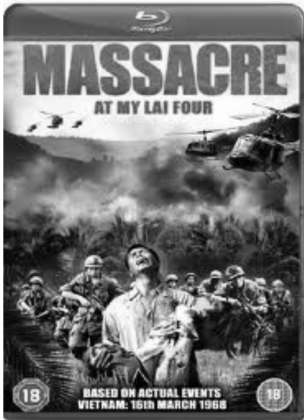
melakukan mediasi dan memproses penyelesaian secara adil, tentu tidak akan ada ruah diskriminasi yang menyakitkan hati.

Dua buku ini mengingatkan kita bahwa jalan menuju masyarakat pluralistik dan demokratis, yang menghargai perbedaan tanpa perlu bersungut dendam, masih sungguh panjang. Sepanjang rencana jembatan Jawa-Sumatera yang belum terancang, akibat trauma tenggelamnya jembatan Kutai-Tenggarong, yang tak lain karena rencana awal sudah pincang.

Pluralisme hanya bisa ditegakkan dengan kejujuran dan keikhlasan hati. Tak akan berhasil hanya dengan retorika, politik, dan mobilisasi.

Pelajaran dari Pembantaian My Lai

Yosep Adi Prasetyo



Judul : *Massacre at My Lai Four*
Format : DVD, Blue Ray
Durasi : 112 menit
Sutradara : Giani Paolucci
Pemain : Alvin Anson, Gianluca Baldari, Beau Ballinger
Produksi : Moonlight Interuction Film, Lionsgate, Warner Bros Pictures, dan Sony Pictures, 2011

Dari sisi hak asasi manusia (HAM), film ini adalah sebuah dokumentasi penting mengenai kejahatan yang terjadi saat Perang Vietnam, akhir dekade 1960an. Film ini diangkat dari sebuah fakta yang awalnya coba ditutup-tutupi oleh Pemerintah Amerika Serikat. Namun berkat berbagai liputan dan protes, akhirnya digelar upaya pengadilan militer untuk mengadili mereka yang dianggap bertanggung jawab.

Film yang diangkat berdasar tulisan wartawan Amerika pemenang Pulitzer pada 1970, Seymour Hersh, ini sesungguhnya sebuah film Italia. Sutradaranya, Giani Paolucci, berkewarganegaraan negeri Menara Pisa itu. Demikian sejumlah pemeran utamanya. Mungkin tak ada orang Amerika yang tertarik untuk menfilamkan kisah horor ini.

Massacre at My Lai dibuat melalui persiapan panjang, studi yang mendalam, termasuk pemilihan lokasi dan kostum para pemainnya. Sutradara terlihat berupaya keras menghidupkan kembali medan perang Vietnam dan gaya orang, terutama para tentara Amerika pada saat itu. Ini tampak dari latar pengambilan gambar, sungai, sawah, gubuk dan kerbau, keadaan alam terutama hutan hujan tropisnya, dibuat mirip seperti

Vietnam. Padahal lokasi syutingnya di Filipina yang memang punya kondisi alam seperti Vietnam.

Film ini selesai diproduksi pada 2009 dan baru tayang pada 2011. Pada 2011 film ini mendapat penghargaan bergengsi sebagai *the Best Motion Picture of the Year Academy Award 2011*. Ada banyak adegan dalam film ini merupakan rekayasa ulang atas momen-momen bersejarah yang diabadikan secara otentik oleh seorang fotografer tentara yang berada di lokasi saat kejadian.

Film ini bercerita tentang penggalan cerita panjang tentang pembantaian yang dilakukan oleh tentara AS terhadap ratusan warga sipil Vietnam tidak bersenjata, dan kebanyakan perempuan dan anak-anak, pada 16 Maret 1968, pada saat Perang Vietnam. Pembantaian ini menjadi lambang kejahatan perang Amerika di Vietnam. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tentara Amerika Serikat ini segera membangkitkan kemarahan di seluruh dunia serta mengurangi dukungan masyarakat di dalam negeri terhadap perang itu sendiri. Peristiwa ini kadangkala juga dikenal dengan nama Pembantaian Son My atau Pembantaian Song My.

Babakan dalam film ini tergolong pendek. Hanya bercerita tentang patroli Kompi C yang dihadang serangan dan dua hari kemudian mereka melakukan penyerangan atas desa-desa yang ditengarai menjadi basis dukungan bagi musuh. Film ini menampakkan sisi kekejaman satuan tentara yang dilatih untuk membunuh dan memusnahkan musuh. Di sisi lain juga menampakkan sebagian wajah humanis manusia yang muak dengan kekejian sejawatnya, sesama tentara.

Terjadinya Pembantaian

Empat puluh tiga tahun lalu, tepatnya pada 16 Maret 1968, sejumlah pasukan tentara Amerika Serikat memasuki kawasan Desa My Lai. Mereka merupakan bagian pasukan yang sedang melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap para gerilyawan Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat dan kader-kader lainnya dari Front Nasional untuk Pembebasan Vietnam (FNPV), yang juga disebut "Viet Cong" atau "VC" oleh pasukan AS.

Desa My Lai secara tidak resmi disebut *pinkville*. Sebutan ini merujuk pada tanda merah jambu desa tersebut pada peta militer AS. Provinsi ini sebenarnya sudah dalam keadaan hancur-lebur karena sering dibom dan ditembaki oleh tentara Amerika. Bahkan bisa dikatakan memasuki tahun 1968 hampir semua rumah di seluruh provinsi ini telah hancur atau rusak.

Pihak militer Amerika di Vietnam menganggap penting untuk memusnahkan para tenaga lapangan FNPV. Militer Amerika tidak mengukur sukses dari banyaknya wilayah atau lokasi strategis yang direbut (misalnya), melainkan berdasar 'jumlah mayat' orang yang dicurigai sebagai tenaga lapangan FNPV yang terbunuh. Para tentara dianjurkan oleh atasan mereka untuk melebih-lebihkan perhitungan yang meninggal guna memberikan kesan keberhasilan militer. Karena tekanan itu, dan kenyataannya seringkali para tenaga lapangan FNPV sulit sekali dibedakan dari rakyat biasa, seringkali ada kesenjangan yang sangat luas antara jumlah mayat yang dilaporkan dalam suatu misi tertentu dengan jumlah senjata musuh yang direbut.

Seorang profesor hukum Universitas Missouri, Kansas, Doug Linder, menyatakan bahwa para tentara Amerika menyebarkan lelucon tentang "apapun yang mati dan bukan putih adalah VC (Viet Cong)". Memang tidak diragukan bahwa banyak warga sipil yang terbunuh di provinsi itu, sehingga semakin membakar yang sudah ada di wilayah tersebut.

Para pemberontak kadang-kadang ditampung dan dilindungi oleh warga sipil di daerah itu. Banyak tentara Amerika yang menjadi frustrasi karena keterlibatan rakyat setempat. Ditambah dengan ketidakmampuan mereka untuk mengejar musuh yang selalu lolos dan meluasnya rasa ketakutan akan disergap. Kemarahan ini semakin menambah kemungkinan mereka melakukan balas dendam yang kejam terhadap warga sipil.

Pada Januari 1968, Batalyon 48 dari FNPV melakukan serentetan serangan terhadap Quang Ngai. Intelijen militer AS menyimpulkan bahwa Batalyon 48 ini, setelah mengundurkan diri, berlindung di desa *Son*

My. Sejumlah kampung tertentu di desa itu—yang dinamai sebagai My Lai 1, 2, 3 dan 4 (yang dijuluki *Pinkville*)—dicurigai sebagai tempat berlindung anggota batalyon itu. Pasukan AS kemudian merencanakan serangan besar-besaran terhadap kampung-kampung itu. Rencana ini melibatkan sebuah satuan setingkat kompi, yaitu Kompi C yang merupakan bagian dari Brigade ke-11 Divisi Amerika.¹

Pada malam menjelang serangan itu, Kompi C dinasihati oleh komando militer AS bahwa warga yang benar-benar sipil di My Lai akan meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke pasar pada pukul 07.00 pagi hari. Mereka menyimpulkan bahwa semua orang yang tinggal di rumah pasti Viet Cong atau simpatisan aktifnya. Mereka diperintahkan untuk menghancurkan desa itu. Pada saat *briefing*, Kapten Ernest Medina ditanya apakah perintah itu termasuk membunuh kaum perempuan dan anak-anak. Mereka yang hadir dalam *briefing* itu belakangan memberikan jawaban yang berbeda-beda tentang tanggapan Medina.

Pasukan AS yang tiba di desa itu pada pagi hari 16 Maret 1968 tak menemukan pemberontak satu pun. Para tentara itu, satu peleton yang dipimpin oleh Letnan William Calley,² kemudian mengumpulkan ratusan penduduk di sebuah lapangan kecil. Penduduk yang terdiri dari anak-anak, perempuan, balita, dan dan kaum lansia ini kemudian ditanyai apakah ada di antara mereka yang tahu tentang Viet Cong dan apakah mereka menyembunyikannya. Tak ada satu pun penduduk yang menjawab dan menunjuk keberadaan anggota Viet Cong. Karena habis kesabaran, Letnan Callay mengeluarkan perintah pada anak buahnya untuk bertindak. Ratusan warga sipil dibunuh dengan cara ditembak. Sebagian disiksa atau diperkosa. Lusinan digiring ke sebuah lubang dan ditembak mati dengan senjata otomatis. Pada satu kesempatan, Calley

1. Kompi C ini disebut sebagai *Charlie Company* tiba di Vietnam pada Desember 1967. Selama bulan-bulan pertama mereka di Vietnam, Kompi C belum pernah melakukan kontak senjata secara langsung dengan musuh.

2. Calley lahir di Miami, Florida, dan gagal Dari *Palm Beach Junior College* sebelum mendaftar di Angkatan Darat. Ia menjadi letnan dua pada September 1967, tak lama setelah pergi ke Vietnam. Calley seorang perokok berat yang menghabiskan empat bungkus rokok setiap hari. Tubuhnya tergolong jangkung dan ramping dengan mata abu-abu tanpa ekspresi. Teman-temannya menggambarkan Calley sebagai orang "kobo" di angkatan darat.

mengungkapkan maksudnya untuk melemparkan sejumlah granat ke sebuah liang yang penuh dengan warga desa.³

Pengakuan atas jumlah korban peristiwa tersebut masih menimbulkan tanda tanya. Jumlah korban yang pasti berbeda-beda dari sumber yang satu ke sumber lainnya. Yang paling sering disebut adalah 347 dan 504 korban. Sebuah peringatan di tempat pembantaian itu mencantumkan 504 nama, dengan usia korban antara 82 tahun yang paling tua hingga 1 tahun yang paling muda. Menurut laporan seorang letnan Angkatan Darat Vietnam Selatan kepada para atasannya, ini adalah suatu insiden pertumpahan darah yang "mengerikan" oleh suatu pasukan bersenjata yang berusaha melampiaskan kemarahannya.

Seorang awak helikopter Angkatan Darat AS berupaya menyelamatkan sejumlah warga sipil dengan cara mendarat di antara pasukan-pasukan Amerika dan sisa-sisa orang Vietnam yang bersembunyi di lubang perlindungan. Penerbang berusia 24 tahun dibantu dua anggota lainnya dari awak helikopter itu mencoba melakukan evakuasi warga desa dan berhasil menyelamatkan sekurang-kurangnya 11 jiwa. Namun tentara AS tak lama setelah peristiwa itu justru mengancam pilot dan awak helikopter itu sebagai pengkhianat.⁴

Terbongkarnya Kejahatan

Terbongkarnya insiden My Lai ini berawal mula dari penelitian yang dilakukan oleh Komandan Brigade Infantri Ringan ke-11, Kolonel Oran

3. Data ini banyak diungkap media di Amerika Serikat sepanjang 1969-1970. Liputan yang menonjol adalah liputan yang diturunkan oleh majalah Time, majalah Newsweek, majalah Life, dan majalah The New Yorker. Lihat juga Seymour M. Hersh, *Cover-up: the Army's Secret Investigation of the Massacre at My Lai*, Random House, 1972. Pada mulanya potongan cerita tentang pembantaian My Lai ditulis Hersh dan dimuat di St Louis Post-Dispatch pada tanggal 13, 20 dan 25 November 1969. Hersh sendiri memenangkan Penghargaan Pulitzer pada tahun 1970. Seymour Hersh, setelah percakapan mendalam dengan Ridenhour, membuka cerita My Lai pada 12 November 1969, dan pada 20 November majalah Time, Life dan Newsweek semuanya meliput kisahnya, dan CBS menyiarkan di televisi wawancara dengan Paul Meadlo, The Plain Dealer (Cleveland) menerbitkan foto-foto yang sangat jelas tentang penduduk desa yang mati terbunuh di My Lai. Sebagaimana terbukti dari komentar-komentar yang dibuat pada percakapan telepon 1969 antara Penasihat Keamanan Nasional AS Henry Kissinger dan Menteri Pertahanan Melvin Laird, yang baru-baru ini diungkapkan oleh Arsip Keamanan Nasional (NSA), foto-foto tentang kejahatan perang itu terlalu mengejutkan para perwira senior hingga mereka tidak bisa dengan efektif menutup-nutupinya. Menteri Pertahanan Laird terdengar mengatakan, "Ada terlalu banyak mayat anak-anak yang berserakan di sana; foto-foto ini memang otentik."

4. Sang pilot yang mengancam akan membuka peristiwa pembantaian dengan cara memberikan kesaksian akhirnya tewas terbunuh setelah sebelumnya pesawat helikopter yang dikendarainya ditembaki. Seymour M. Hersh menyatakan bahwa si pilot sengaja dibunuh dengan cara ditembaki dari bawah oleh pasukan AS sendiri untuk menghilangkan jejak pembantaian My Lai. Salah satu orang yang berjasa ikut mengungkapkan kekejian My Lai adalah anak buah Callay yang juga anggota Kompi C, yaitu jurufoto Ronald L. Haeberle.

Henderson. Atas dasar perintah dari perwira Asisten Komandan Divisi Amerika, Brigadir Jenderal Young, Hendersen mewawancarai sejumlah perwira yang terlibat dalam insiden ini. Hendersen kemudian mengeluarkan sebuah laporan tertulis pada akhir April 1969, yang isinya menyatakan bahwa sekitar 20 warga sipil secara tidak sengaja terbunuh pada operasi militer di My Lai. Pada saat ini tentara masih menggambarkan peristiwa ini sebagai kemenangan militer yang mengakibatkan kematian 128 orang pada pihak lawan.

Enam bulan kemudian, seorang perwira muda dari Infantri Ringan ke-11 (Brigade Jagal) yang bernama Tom Glen menulis surat berisi tuduhan terhadap Divisi America I dan seluruh satuan lainnya militer AS telah melakukan perbuatan yang brutal terhadap warga sipil Vietnam. Surat itu yang sangat rinci isinya itu berisi tuduhan yang mengerikan. Dan surat tersebut tidak sendirian, karena isinya juga menggemakan berbagai keluhan yang diterima dari tentara-tentara lain.

Seorang tentara di Angkatan Darat AS berpangkat mayor, Colin Powell,⁵ mendapat perintah untuk mengecek dan meneliti kebenaran surat Tom Glen, terutama yang berkaitan dengan insiden My Lai. Powell menyimpulkan bahwa tuduhan itu tak benar. Dia kemudian menulis, "Sebagai bantahan langsung terhadap penggambaran ini adalah kenyataan bahwa hubungan antara tentara-tentara Amerika dan rakyat Vietnam sangat baik." Belakangan, bantahan Powell disebut sebagai upaya "memutihkan" berita tentang My Lai, dan pertanyaan-pertanyaan tetap disembunyikan dari publik.

Peristiwa pembantaian My Lai itu mungkin akan lenyap dalam sejarah bila bukan karena seorang perwira, Ron Ridenhour, yang berkirim surat kepada Presiden Nixon, Pentagon, Departemen Luar Negeri, Kepala Angkatan Bersenjata, dan sejumlah anggota Kongres. Berbagai salinan suratnya dikirim pada Maret 1969, tepat setahun setelah kejadian itu. Kebanyakan penerima surat Ridenhour mengabaikannya, kecuali anggota Dewan Perwakilan Morris Udall. Ridenhour mengetahui tentang kejadian-kejadian di My Lai lewat orang lain, melalui pembicaraan dengan mantan anggota Kompi C, saat ia masih aktif menjadi tentara.

5. Di kemudian hari Collin Powel menjadi tokoh militer AS terkemuka dan kemudian diangkat menjadi Menteri Luar Negeri AS. Pada 4 Mei 2004, Powell, yang saat itu merupakan Menteri Luar Negeri AS, berkata kepada Larry King, dalam sebuah wawancara di TV CNN, "Maksud saya, saya berada dalam kesatuan yang bertanggung jawab atas My Lai. Saya tiba di sana setelah My Lai terjadi. Jadi, dalam peperangan, hal-hal yang mengerikan seperti ini sesekali terjadi, namun semuanya itu harus disesali."

Mahkamah Militer

Letnan William Calley akhirnya dihadapkan ke mahkamah militer dan didakwa melakukan sejumlah pembunuhan terencana, September 1969. Menyusul setelah itu sebanyak 25 perwira lain ikut didakwa dengan kejahatan terkait. Namun, baru dua bulan kemudian publik Amerika mengetahui tentang pembantaian dan peradilan itu.

Pada 17 Maret 1970, Angkatan Darat Amerika Serikat mendakwa 14 perwiranya yang dianggap telah menyembunyikan informasi berkaitan dengan insiden My Lai. Kebanyakan dari dakwaan ini kemudian dibatalkan. Letnan William Calley kemudian dinyatakan bersalah pada 1971. Dia dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan terencana dengan memerintahkan penembakan kepada anak buahnya. Calley mulanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dua hari kemudian Presiden Richard Nixon memerintahkan supaya ia dibebaskan dari tahanan penjara untuk menjalani tahanan rumah selama 3,5 tahun di markasnya di Fort Benning, Georgia. Seorang hakim federal kemudian memerintahkannya bebas.

Calley mengklaim bahwa dia cuma mengikuti perintah dari kaptenya, Ernest Medina. Namun Medina menyangkal bahwa ia telah memberikan perintah itu. Medina sendiri dibebaskan dalam peradilan yang terpisah. Kebanyakan dari para perwira yang terlibat dalam Insiden My Lai ini tidak mendaftar lagi sebagai anggota militer. Dari 26 orang yang mula-mula dikenai dakwaan, Letnan Calley adalah satu-satunya yang dinyatakan terbukti bersalah.

Berita tentang pengadilan yang mengungkap kekejian di My Lai ini menimbulkan kecaman luas terhadap kebijakan AS dalam Perang Vietnam. Hal ini juga yang membangkitkan kemarahan gerakan perdamaian Amerika yang saat itu tengah dikobarkan oleh kaum muda yang menamakan diri sebagai generasi bunga (*flower generation*). Mereka menuntut penarikan mundur semua pasukan AS dari Vietnam. Hal ini juga menyebabkan lebih banyak calon wajib militer yang mendaftarkan diri sebagai penentang perang Vietnam berdasarkan nurani. Mereka yang telah selamanya menentang perang merasa menang.

Sejak pengungkapan pembantaian My Lay ini terjadi pergeseran yang lebih besar pada sikap masyarakat umum terhadap perang Vietnam. Orang yang sebelumnya tidak tertarik akan perdebatan perang/damai mulai menganalisis masalahnya dengan lebih cermat. Kisah-kisah mengerikan tentang prajurit-prajurit yang lain mulai ditanggapi lebih sungguh-sungguh, dan berbagai pelanggaran muncul ke permukaan.

Pelajaran Penting dari Film My Lai

Pengadilan terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas pembantaian My Lai sangat menarik. Risalah-risalah persidangan dan berbagai kliping berita yang mudah diakses melalui internet perlu dipelajari dan didiskusikan kembali.

Kalangan militer, termasuk militer di Indonesia, kerap mengabaikan HAM. Militer beranggapan yang lebih mengikat kerja-kerja dalam kemiliteran adalah hukum humaniter. Jelas ini adalah pandangan yang salah, karena pada dasarnya terdapat persinggungan antara hukum humaniter dan HAM

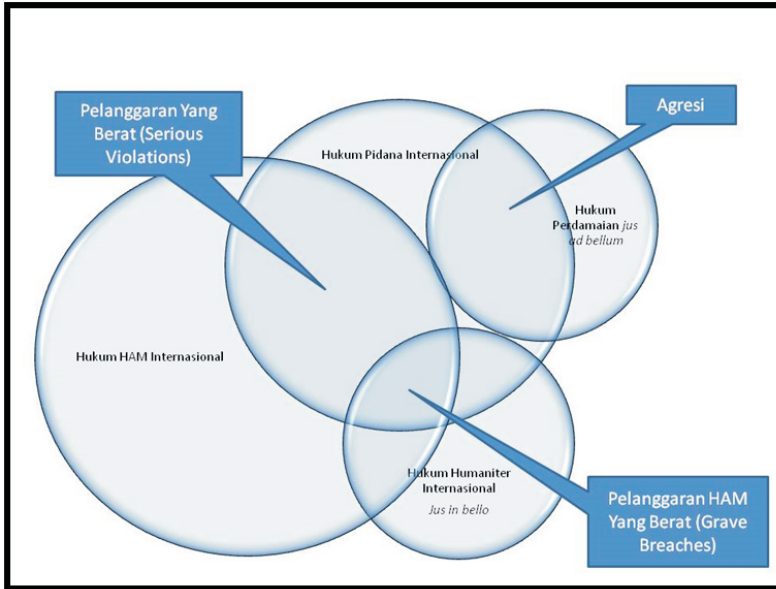
Penerapan HAM pada dasarnya lebih ditekankan pada situasi damai atau bukan situasi perang, sedangkan hukum humaniter berlaku dan diterapkan hanya dalam situasi perang. Dalam konteks ini perang diartikan sama dengan sengketa bersenjata di mana ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu situasi saling bertentangan atau konfrontatif, dan masing-masing pihak telah menggunakan kekuatan angkatan bersenjata.

Namun, sekalipun berbeda dalam hal waktu penerapannya, hukum humaniter dan hak asasi manusia pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan kemanusiaan kepada mereka yang berada dalam situasi yang lemah. Dalam konteks hak asasi manusia, misalnya, yang berada dalam situasi lemah adalah warga negara yang dihadapkan dengan pihak penguasa. Sedangkan dalam konteks hukum humaniter yang berada dalam situasi lemah adalah penduduk sipil serta "*combatant*" yang menjadi korban perang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum humaniter merupakan kelanjutan hukum hak

asasi manusia yang diterapkan pada waktu perang.

Berikut adalah bagan persinggungan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia:

Bagan 1
Persinggungan Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum HAM



Aspek pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter serta prosedur dan mekanisme penegakannya erat terkait dengan hukum pidana internasional. Tentu saja tidak semua pelanggaran hak asasi manusia dapat dimasukkan dalam lingkup hukum pidana internasional. Sebaliknya semua pelanggaran hukum humaniter (atau yang biasa disebut dengan kejahatan perang) termasuk dalam lingkup hukum pidana internasional. Hanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tertentu saja yang termasuk dalam lingkup hukum pidana internasional, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang keduanya dikategorikan sebagai "*gross violation of human rights*" atau pelanggaran berat hak asasi manusia.

Sedangkan Hukum Humaniter terdiri dari Hukum Jenewa, Hukum Den Haag, dan Hukum Campuran. Konvensi Jenewa IV mengatur tentang perlindungan kepada penduduk sipil dalam peperangan. Sebelum tahun 1949 Hukum Humaniter belum dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat sipil, sehingga pada tahun 1949 disetujui Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan kepada penduduk sipil dalam peperangan, dalam konvensi tersebut menegaskan bahwa: setiap orang mempunyai hak dan jaminan asasi yang harus dihormati tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Anderson, David L. (1998) *Facing My Lai: Moving Beyond the Massacre* University Press of Kansas: Lawrence, Kansas — wawancara mendalam dengan mereka yang ikut diadili dan para anggota militer.
- Belknap, Michal R. (2002) *The Vietnam War on Trial: The My Lai Massacre and the Court-Martial of Lieutenant Calley*. University Press of Kansas.
- Bilton, Michael and Sim, Kevin. (1992) *Four Hours in My Lai* New York: Viking, 1992.
- Chomsky, Noam. *After Pinkville, Bertrand Russell War Crimes Tribunal on Vietnam*, 1971
- Colburn, Lawrence and Paula Brock. —, *Seattle Times*, 10 Maret 2002
- Department of the Army. *Report of the Department of the Army Review of the Preliminary Investigations into the My Lai Incident (The Peers Report)*, Volumes I-III (1970).
- Gershen, Martin. (1971) *Destroy or Die: The True Story of My Lai* New York: Arlington House.
- Goldstein, Joseph. (1976) *The My Lai Massacre and its Cover-Up* New York: Free Press.
- Hammer, Richard. (1971) *The Court-Martial of Lt. Calley* New York: Coward.
- Hersh, Seymour M. (1972). *Cover-up: the Army's secret investigation of the massacre at My Lai 4*. Random House
- Hersh, Seymour M. (1970). *My Lai 4: A Report on the Massacre and Its Aftermath*. Random House.
- Olson, James S. and Roberts, Randy (eds.) (1998) *My Lai: A Brief History with Documents*, Palgrave MacMillan.
- Peers, William. (1979) *The My Lai Inquiry* New York: Norton.
- Sack, John. (1971) *Lieutenant Calley: His Own Story* New York: Viking. University of Missouri-Kansas City Law School. *The My Lai Courts-Martial*, 1970.

